

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Tanpa adanya transaksi, maka laporan keuangan tidak dapat dilakukan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Tujuan pelaporan keuangan pemerintah ialah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan sebagai pertanggungjawaban yang berisikan informasi untuk entitas yang berkepentingan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Sebelum menjadi laporan keuangan, Pemerintah bersama Anggota Dewan umumnya menetapkan APBN/APBD yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 adalah untuk “menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya”, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumberdaya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, hasil operasi,

perubahan ekuitas yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

2.1.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan paragraf 35 menjelaskan bahwa, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki Manfaat Umpan Balik (*Feedback Value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki Manfaat Prediktif (*Predictive Value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan

informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik;

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya terdiri dari empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah terdiri dari tujuh, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.1.5 Laporan Operasional

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, “Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya

dibandingkan dengan periode sebelumnya”. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan penyusunannya. Dalam PSAP Nomor 12 Laporan Operasional dijelaskan bahwa pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d) kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- e) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan terdiri dari pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

2.1.1.6 Struktur Laporan Operasional

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan dan Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan

berdasarkan jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

2. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan nonoperasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan nonoperasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

5. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos

Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

6. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, struktur Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, beban yang dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

2.1.1.7 Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikann laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Masing-masing Kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, sesuai peraturan peundang-undangan yang wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang termasuk sebagai entitas pelaporan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2018:25), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Kinerja dapat diketahui jika organisasi atau individu mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan. Keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Menurut Halim (2012:212) menyatakan bahwa, “Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang mana penilaiannya menggunakan rasio keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kegiatan atau program pemerintah daerah dalam menjalankan dan meningkatkan otonomi daerah dengan memperhatikan pengelolaan keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang ada dalam menunjang kegiatan pemerintah daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis laporan keuangan yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2019:89), “Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Sedangkan menurut Mahsun (2018:135), “Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan”. Menurut Munawir (2010:35), “analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian analisis laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012:68), ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Sedangkan menurut Mahmudi (2019:89), “Laporan keuangan perlu

dinalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan dan hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran kinerja keuangan sehingga dapat mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan.

2.1.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012:69), dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu:

1. Analisis Vertikal (Statis)
Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode sajadan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
2. Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain.

Menurut Kasmir (2012:70), adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perbandingan Antara Laporan Keuangan
Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, seperti kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Analisis *Trend*
Analisis *trend* atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah perusahaan mengalami perubahan yaitu naik, turun atau tetap serta seberapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.
3. Analisis Persentase per Komponen
Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana
Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode, serta untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja perusahaan dalam suatu periode.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode, serta untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas dalam periode tertentu.
6. Analisis Rasio
Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan.
7. Analisis Kredit
Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank.

Sedangkan menurut Mahmudi (2019:90), terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, antara lain:

1. Analisis Varians (Selisih)
Analisis varians (selisih) pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi.
2. Analisis Rasio Keuangan
Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.
3. Analisis pertumbuhan (*Trend*)
Analisis pertumbuhan atau *trend* dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui perkembangan kinerja.
4. Analisis Regresi
Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.
5. Analisis Prediksi
Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat digunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar prediksi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode analisis laporan keuangan terdiri dari dua yaitu vertikal dan horizontal sedangkan teknik analisis terdiri dari tujuh yaitu analisis perbandingan antar laporan keuangan, analisis *trend*, analisis persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan dana, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio keuangan, analisis kredit, analisis varians, analisis regresi dan analisis prediksi. Setiap metode analisis mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membuat agar data lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.1.3.4 Analisis Perbandingan Laporan Keuangan (*Comparative*)

Analisis perbandingan laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode (Kasmir, 2012:70). Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan (*tendensi*) tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Dari analisis ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kasmir (2012:70), Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain:

- a. Angka-angka dalam rupiah;
- b. Angka-angka dalam persentase;
- c. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah;
- d. Kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun dalam persentase.

2.1.3.5 Analisis Persentase per Komponen (*Common Size*)

Menurut Kasmir (2012), analisis *common size* atau analisis persentase perkomponen merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis

komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Menurut Halim (2009), analisis *common size* disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan (untuk laporan laba rugi) atau dari total aktiva (untuk neraca). Menurut Jusuf (2012), *common size analysis* adalah menganalisis laporan keuangan untuk satu periode tertentu dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menggunakan persentase di mana salah satu pos ditetapkan persentase 100%.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa analisis persentase per komponen adalah analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membanding-bandingkan pos yang satu dengan pos lainnya.

2.1.3.6 Analisis Rasio Keuangan

Mahmudi (2019:90) menjelaskan bahwa, “Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis”. Dalam penelitian kali ini, akan digunakan rasio keuangan untuk menganalisis laporan operasional yaitu rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi.

2.1.3.6.1 Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudi (2019:187), “Analisis pertumbuhan memberikan gambaran tentang kecenderungan berupa kenaikan, penurunan, atau stagnasi keuangan”. Kinerja pendapatan pada Laporan Operasional dinilai baik apabila terjadi pertumbuhan yang positif atau terjadi kenaikan secara kesinambungan dan relatif stabil. Namun untuk pos beban, adanya kenaikan atau pertumbuhan positif pada pos beban tidak selalu buruk, namun juga tidak berarti bagus. Pertumbuhan beban bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi namun bisa juga berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi yang pada akhirnya berdampak buruk pada perekonomian. Rumus untuk menghitung pertumbuhan adalah menghitung selisih nilai pos yang diukur tahun sekarang (tahun t) dari tahun

sebelumnya (tahun t-1) kemudian dibandingkan dengan nilai pos tersebut pada tahun sebelumnya (tahun t-1).

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2019:188)

$$\text{Pertumbuhan Beban th t} = \frac{\text{Beban Th t} - \text{Beban Th (t-1)}}{\text{Beban Th (t-1)}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2019:188)

Keterangan:

Pendapatan/Beban Th t = Total Pendapatan/Beban yang dihitung pada tahun ke-t

Pendapatan/Beban (t-1) = Total Pendapatan/Beban yang dihitung pada tahun ke-t minus 1 (tahun sebelum t).

Tabel 2.1
Kriteria Pertumbuhan

Kategori	Kriteria pertumbuhan
Pos sebelumnya < Pos berikutnya	Positif
Pos sebelumnya > Pos berikutnya	Negatif

Sumber: Mahmudi, (2019:188)

2.1.3.6.2 Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019:189), “Efisiensi dapat dibedakan menjadi beberapa level, yaitu efisiensi pada level organisasi, efisiensi pada level program, dan efisiensi pada level aktivitas”. Ukuran efisiensi yang mendasarkan data Laporan Operasional lebih untuk mengukur efisiensi pada level organisasi.

Efisiensi diukur dengan membandingkan antara input dengan output. Dalam laporan operasional, input direpresentasikan dengan jumlah beban sedangkan output merupakan jumlah pendapatan LO. Rasio efisiensi yang lebih kecil mengindikasikan kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan rasio efisiensi yang tinggi. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2019:189)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan analisis laporan keuangan daerah yang diuraikan dalam tabel 2.2 tentang Penelitian Terdahulu sehingga dapat dijadikan acuan atau pembanding bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lutfiah Safitri (2020)	Analisis Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Tahun 2017-2019)	Presentase pos-pos Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja dari tahun 2017-2019 adalah Pendapatan ditahun 2018 mengalami penurunan hingga Pemda Kabupaten Sragen mengalami defisit, namun ditahun 2019 pendapatan meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya dan mengalami surplus.
2.	Jonathan Ramsei Simarmata (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Padang Sidempuan Tahun 2015-2017	Kinerja keuangan pemerintah Kota Padang Sidempuan jika dilihat dari varians pendapatan dapat dikatakan “tidak baik”, Kinerja keuangan pemerintah dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikatan “baik”, Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio efektifitas pajak daerah “tidak baik”, Kinerja keuangan pemerintah dilihat dari rasio efektifitas pajak daerah masih

			<p>“tidak baik”. Rasio ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan dapat dikatakan “tidak baik”, Kinerja keuangan pemerintah daerah dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan “rendah sekali”. Analisis varians belanja daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah “baik”, Pertumbuhan belanja daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan negative, Rasio efisiensi belanja daerah bahwa kinerja Pemerintah Kota Padang Sidempuan sudah “baik” rasio efektifitas keuangan daerah Pemerintah Kota Padang Sidempuan “tidak baik”.</p>
3.	Rendy Pebrianto (2019)	Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta Tahun 2013-2017	<p>Rasio Pertumbuhan menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Yogyakarta tahun 2013 sampai 2017 mengalami pertumbuhan yang naik turun. Rata-rata pertumbuhannya cukup baik karena mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.</p>

			<p>Analisis <i>Common size</i> Laporan Realisasi Anggaran pada rasio pendapatan daerah penghasilan terbesar berada pada komponen dana perimbangan yang memiliki nilai rata-rata diatas 50%. Pada rasio belanja daerah alokasi dana lebih banyak digunakan untuk belanja operasi daripada untuk belanja modal. Sedangkan untuk surplus/defisit rata-ratanya cukup baik, walaupun fluktuatif tetapi tidak menunjukkan nilai defisit/negatif.</p>
4.	Syamsul, Lilia Fifiyani (2019)	Review Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Analisis Horisontal Dan Vertikal	Rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebesar 61,19% dan mayoritas tingkat kontribusi masing-masing komponen PAD < 30%.
5.	Ai Siti Farida, Raden Faisal Maulana Nugraha (2019)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	<p>Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014- 2017 berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah.</p> <p>Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisien. Namun, kendati demikian kinerja keuangan</p>

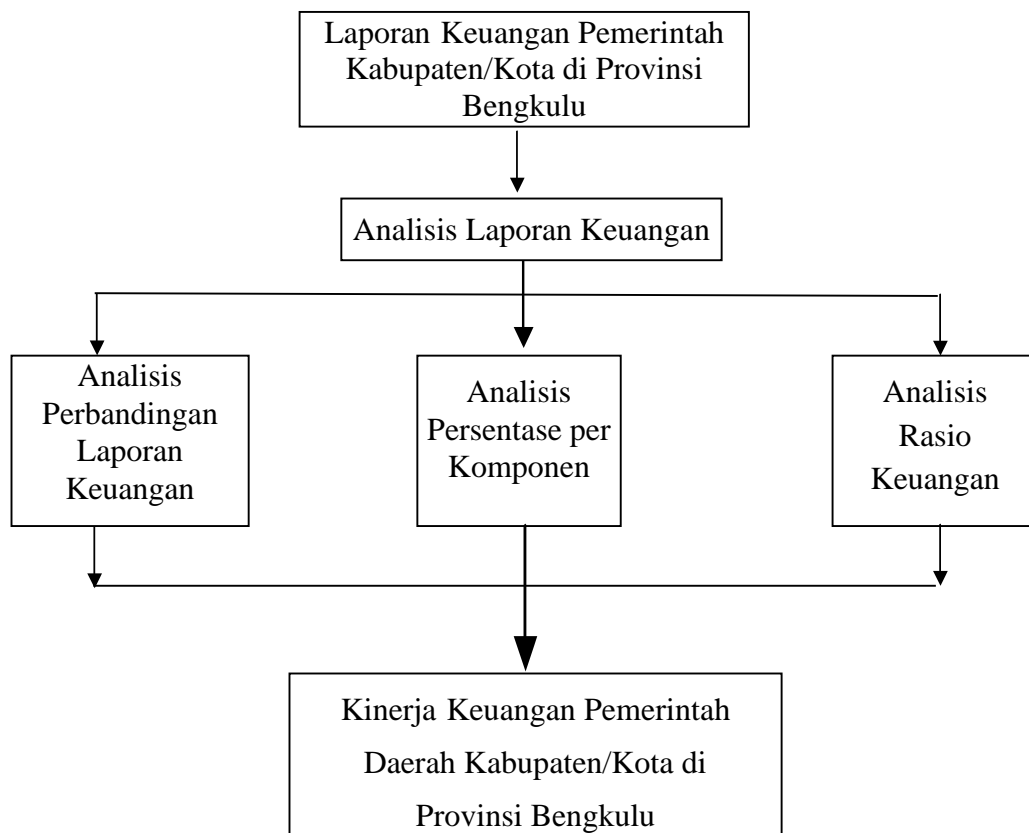
			Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah berjalan efektif karena efektivitasnya sudah di atas 100% yaitu masing-masing sebesar: 127,2%; 111,6%; 110,6%; dan 105,8%.
6.	Arie Rachma Putri, Nur Kabib (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015	Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Klaten masih belum optimal, walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif.
7.	Dela Galuh Pratiwi (2017)	Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Tahun 2011-2015)	Persentase per pos LRA dan Neraca dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif, realisasi anggaran tahun 2011-2015 selalu mencapai target yang ditetapkan, serta kinerja laporan keuangan di BKD Sukoharjo sudah baik namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk realisasi anggaran tahun berikutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan dan Aset Daerah pada LRA dan Neraca sudah baik dalam realisasinya.
8.	Diva Primananda (2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota	Dana perimbangan memiliki proporsi terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya dengan rata-

		Surakarta Tahun 2010 - 2015	<p>rata 50% setiap tahunnya, namun proporsi pendapatan asli daerah juga selalu meningkat setiap tahunnya.</p> <p>Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta pada tahun anggaran 2010-2015 menunjukkan masih sangat tergantung pada dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat. Namun ketergantungan tersebut perlahan menurun dengan diiringinya peningkatan pada pendapatan asli daerah.</p>
9.	Muhammad Wahyudi, Eva wulandari (2017)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)	<p>Kinerja keuangan daerah belum konsisten, dimana mengalami trend positif dan trend negatif. Kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih kurang.</p>
10.	Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014	<p>Kinerja pemerintah dalam mengelola pendapatannya dikatakan baik ini dibuktikan dari varians pendapatan yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan.</p>

Sumber: Data yang diolah, 2021

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), “Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti”. Berdasarkan landasan teori dan masalah yang diteliti, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 sebagai berikut:



Sumber: Penulis, 2021.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan diukur menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan (*Comparative*), analisis persentase per komponen (*Common Size*), dan analisis rasio keuangan berupa analisis pertumbuhan pendapatan dan beban laporan operasional dan analisis rasio efisiensi.